



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ ~~522~~ /DP3ACSKB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA TERPILAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, perlu membentuk Forum Penyelenggaraan Data Terpilah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Penyelenggaraan Data Terpilah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Atas Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 20 Seri E);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penyelenggaraan Data Terpilah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Forum Data dan Informasi Gender dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Data;
- b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- d. menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data pada perangkat Daerah masing-masing yang selanjutnya dijadikan data skunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Data minimal 3 (tiga) bulan sekali

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Mei 2019

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

FORUM PENYELENGGARAAN DATA TERPILAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	PERANGKAT DAERAH
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Koordinator Data Kependudukan dan Pembangunan	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5.	Koordinator Data Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6.	Koordinator Data Pernikahan dan Perceraian	Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Koordinator Data Partisipasi KB	Kepala Kanwil BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8.	Koordinator Data Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif/Pemerintah	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9.	Koordinator Data Partisipasi Perempuan dalam Ormas, Parpol, Caleg, dan DPRD	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Koordinator Data Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Koordinator Data Ketenagakerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12.	Koordinator Data Partisipasi Ekonomi Perempuan	1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13.	Koordinator Data Sosial dan Anak Berhadapan dengan Hukum	Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14.	Koordinator Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15.	Koordinator Data Gender	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16.	Koordinator Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17.	Koordinator Data Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

18.	Koordinator Data Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	1. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka
19.	Koordinator Data Kabupaten Bangka	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kab. Bangka
20.	Koordinator Data Kota Pangkalpinang	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang
21.	Koordinator Data Kabupaten Bangka Barat	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bangka Barat
22.	Koordinator Data Kabupaten Bangka Tengah	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bangka Tengah
23.	Koordinator Data Kabupaten Bangka Selatan	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Selatan
24.	Koordinator Data Kabupaten Belitung	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
25.	Koordinator Data Kabupaten Belitung Timur	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung Timur

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN